

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai forum baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Dalam menjalin hubungan tersebut Indonesia senantiasa mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan.¹ Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa *non-self governing territory*. Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan. Salah satu kawasan tersebut adalah Afrika. Hubungan bilateral Indonesia Afrika telah berlangsung sejak 1994 ketika Indonesia mendukung perjuangan (*African National Congress*) ANC menentang Apartheid. Hubungan Indonesia-Afrika saling meningkat dengan adanya saling dukung dalam forum internasional dan saling kunjungan di antara pejabat tinggi ke dua Negara.

Bangsa Indonesia adalah pelopor dilaksanakannya Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. KAA ini melahirkan prinsip-prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung kemudian menjadi dasar hubungan antara

negara-negara Asia-Afrika. Dengan semangat ini pulalah Indonesia kembali sebagai penggagas *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP) bersama Afrika Selatan yang merupakan penggerak utama (*prime mover*) dari program-program NAASP. Dan disini Indonesia mempunyai harapan yang besar yaitu kepentingan Indonesia khususnya dalam memperkuat postur politik dan kredibilitas Indonesia (*branding*)²

Bangsa dan rakyat Indonesia telah memberikan dukungan kepada rakyat Tunisia di dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dari Perancis. Dukungan tersebut diperkuat melalui forum konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, serta pendirian kantor perjuangan rakyat Tunisia di Jakarta pada tahun 1951. Setelah Tunisia memperoleh kemerdekaan pada bulan Juli 1957, hubungan antara Presiden Soekarno dan Presiden Habib Bourguiba kian dekat. Hal ini mempererat hubungan antara rakyat kedua Negara hingga saat ini. Hubungan bilateral dibidang politik antar republik Indonesia dan Tunisia terjalin seiring dengan dibukanya kedutaan besar RI di Tunisia pada tahun 1960, yang sekaligus menandai pembukaan hubungan diplomatik antara kedua Negara.

Hubungan yang baik antara kedua Negara juga tercermin dari adanya saling kunjung para pejabat serta pemberian dukungan dalam jabatan/ keanggotaan organisasi internasional. Dalam bidang ekonomi atau perdagangan, beberapa persetujuan bilateral kedua Negara juga telah terjalin. Komoditi ekspor utama Indonesia sebagian besar adalah bahan baku seperti minyak nabati, bahan tekstil, karet, sepatu, mesin, elektronik, kertas dan rempah-rempah. Sedangkan impor Indonesia dari Tunisia antara lain noshate bahan semen korma dan minyak zaitun. Sedangkan produk-produk

Indonesia yang mempunyai peluang dan prospek di pasar Tunisia antara lain produk elektronika, suku cadang kendaraan bermotor, Aneka produk plastik, makanan dalam kaleng (ikan, buah-buahan dan lain-lain), teh, kopi, karet, kayu (kayu gelondongan/geragajian hingga furniture) rotan dan tekstil.³

Hubungan bilateral Indonesia-Tunisia di bidang ekonomi dan perdagangan secara resmi telah dimulai dengan ditandatanganinya persetujuan perdagangan oleh Menlu kedua negara pada tahun 1983 di Jakarta. Dalam tahap selanjutnya, kedua negara telah menandatangani perjanjian bilateral di berbagai bidang dan dalam pertemuan ke-6 ini menurut rencana akan ditandatangani nota kesepahaman (MoU) kerjasama Promosi Perdagangan dan Pameran. Dengan adanya persetujuan itu diharapkan dapat lebih meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. Selain itu pembahasan kemungkinan untuk melakukan perdagangan dengan cara "*counter trade*" (imbal beli) dengan menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral serta pengembangan usaha kecil menengah kedua negara. Komisi bersama ini juga akan menyelenggarakan forum bisnis yang melibatkan para pengusaha kedua negara dari berbagai sektor seperti industri hasil pertanian, komponen mobil, bahan bangunan, kulit, sepatu, tekstil dan pakaian, serta furniture plastik.⁴

³Kedutaan Besar Republik Indonesia, *Tunisia Selayang Pandang*. 2006, Tunis. Hal 15-16. Dikutip dari, <http://www.kemlu.go.id>, 20 Februari 2011

⁴<http://www.gatra.com/2001-07-02/>. Dikutip 27 Februari 2011

TABEL I

Neraca Perdagangan Indonesia-Tunisia (dalam ribuan dollar AS)

Tahun	Ekspor	Impor	Saldo	volume
1999	14922	6918	8004	21840
2000	18700	1300	17400	20000
2001	23700	7100	16600	30800
2002	19165	8676	10489	27840
2003	22669	4254	18924	26923
2004	18197	2500	15697	36394
2005	26400	15300	11100	52800

Sumber: Kedutaan Republik Indonesia di Tunisia 2005

Indonesia-Tunisia memiliki pandangan yang sama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia dan juga keterikatan historis menunjang hubungan Indonesia-Tunisia kedepannya. Tunisia merupakan salah satu negara di Afrika yang mayoritasnya berpenduduk islam. Negara ini menjadi peserta Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955.

Indonesia menyiapkan berbagai kerjasama antara lain, kemudahan dalam mengekspor dan penghidaran pajak berganda. Indonesia berharap dengan hubungan bilateral bidang perdagangan ini komoditi Indonesia yang ada di Tunisia akan masuk ke timur tengah dan Afrika Utara mendapat kemudahan dan ini akan menjadi dampak positif dalam perkembangan internasional Indonesia.⁵

TABEL II

Kesepakatan Kerjasama Indonesia- Tunisia

TAHUN	KETERANGAN
1983	Persetujuan perdagangan
1984	Persetujuan bidang informasi
2001	Promosi bidang perdagangan
2004	Pelaksanaan Indonesia-Tunisia (partnership day)

Sumber: kedutaan Besar Republik Tunisia 2006

Tunisia selalu berupaya untuk memperkokoh hubungan dan kerjasama bilateral, khususnya bagi kepentingan integrasi ekonomi Tunisia di mana Tunisia telah memberlakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa sejak 1 Januari 2008. Hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia.⁶

Secara geografis Tunisia sangatlah strategis yang terletak di jantung Afrika utara dan Eropa. Kecilnya dampak krisis terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tidak terlepas dari faktor kedekatan geografis tersebut membuat biaya wisata ke Tunisia relatif masih terjangkau, meski dalam kondisi krisis ekonomi. Letak Tunisia sangat menguntungkan bila ditinjau dari jalur lalu lintas distribusi barang dan jasa serta lalu lintas manusia. Transportasi udara dari Tunisia ke kota terdekat di Eropa seperti Roma dapat ditempuh dalam waktu satu jam perjalanan udara. kondisi sosial politik yang relatif stabil juga menjadikan Tunisia merupakan target utama wisatawan Eropa di mana saat ini komposisi wisatawan Eropa tetap yang tertinggi mencapai 80 persen.

⁶<http://www.antaraneews.com/> , Dikutip 06 Maret 2011

Stabilnya ekonomi Tunisia juga karena keberhasilan proses integrasi ekonomi yang dilakukan Tunisia, khususnya sejak diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas Tunisia dan Uni Eropa (UE) tanggal 1 Januari 2008, sehingga hubungan ekonomi Tunisia dan UE menunjukkan peningkatan. Dengan diberlakukannya perjanjian tersebut, Tunisia merupakan negara pertama bagian selatan Mediterania dan negara Afrika pertama yang menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Hal ini harusnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa masuk ke Uni Eropa. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Tunisia diproyeksikan pada tahun 2012 akan sama dengan jumlah penduduknya. Sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya Indonesia untuk memberikan perhatian terhadap pasar Tunisia sebagai salah satu pasar alternatif untuk pasar non tradisional.⁷

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari penjelasan dan uraian di atas, maka dapatlah ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana strategi Indonesia menangkap peluang hubungan Tunisia dan Uni Eropa 2008?

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu berupa teori-teori yang dapat kita gunakan. Suatu teori dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum agar penulisan ini mempunyai penjelasan yang logis, terdiri dari sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran dalil tertentu guna mengambil suatu hipotesa.

1. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional menurut Byrns Stone adalah:

*The exchange of goods and services across national boundaries is called international trade.*⁸Teori perdagangan internasional dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni teori klasik dan teori modern. Teori klasik yang umum dikenal adalah teori keunggulan absolut dari Adam Smith, Teori Keunggulan Relatif atau Keunggulan Komparatif dari J.S Mill, dan Teori Biaya Relatif dari David Ricardo, sedangkan teori faktor proporsi dari Heckscher dan Ohlin di buku-buku teks ekonomi internasional disebut sebagai Teori Modern.

⁸Byrns. Stone, *Economics*, (United State of America : Scott, Foresman And Company, 1984).Hal 64

Teori dasar yang mengenai keuntungan komparatif yang menjadi pangkal tolak pertukaran barang dan jasa disebut dengan teori keuntungan komparatif Ricardo.⁹ Teori modern dalam perdagangan internasional dikemukakan pertama kali oleh Bertil Ohlin pada tahun 1933 dalam bukunya "Interregional and International Trade" yang sebagian dari padanya didasarkan atas tulisan gurunya, Eli Heckscher, yang ditulisnya pada tahun 1919, karena Heckscher menulis artikelnya di Swedia, maka dunia luar baru mengenal konsepnya setelah dikemukakan oleh Ohlin. Dengan demikian pionir teori modern dalam perdagangan internasional dikenal sebagai Heckscher dan Ohlin, untuk selanjutnya teori mereka akan kita sebut teori Heckscher-Ohlin atau Teori H-O. jadi teori faktor proporsi (Teori H-O) menyatakan bahwa:

- a. Suatu Negara akan menghasilkan barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif banyak (banyak dalam arti bahwa harga relatif faktor produksi itu relatif murah), sehingga barang itu relatif murah karena ongkos produksinya relatif murah.
- b. Dengan mengutamakan produksi dan ekspornya pada barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif banyak, maka harga faktor produksi yang relatif banyak itu akan naik.

Perkembangan ekspor dari suatu Negara tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor keunggulan komparatif tetapi juga keunggulan kompetitif. Keunggulan suatu Negara di dalam persaingan global selain ditentukan oleh keunggulan komparatif (teori-teori klasik dan H-O) yang dimiliki dan juga karena adanya proteksi atau bantuan fasilitas dari pemerintah, juga sangat ditentukan oleh keunggulan kompetitifnya.

⁹ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional Jilid 2: Kekuasaan Ekonomi Politik Internasional Dan Tata*

Keunggulan tidak hanya dimiliki oleh suatu Negara, tetapi juga dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Negara tersebut. Perbedaan lainnya dengan keunggulan komparatif adalah bahwa keunggulan kompetitif sifatnya lebih dinamis dengan perubahan-perubahan, misalnya teknologi dan SDM, yang sangat cepat.¹⁰

Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan yang mencerminkan interdependensi antar Negara, tanpa banyak menghiraukan perbedaan politik di antara mereka. Pada tingkat yang paling sederhana, suatu Negara akan mengimpor komoditas yang tidak dihasilkan dan mengekspor komoditasnya yang melebihi kebutuhan pasar domestik.

Interdependensi di lingkungan perdagangan, jauh dari hanya sekedar pertukaran barang dan jasa karena adanya sejumlah unit yang diperdagangkan bila pihak-pihak yang terkait menyepakati nilai relatif dari kedua komoditi tersebut.¹¹ Dan dengan tidak adanya spesialisasi penuh dari suatu barang yang diperdagangkan maka akan merubah jumlah barang yang diproduksi oleh suatu Negara.

Perdagangan internasional dilakukan diantara beberapa Negara yang saling membutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap Negara melakukan pengawasan dari perdagangan internasional tersebut dengan cara yang bervariasi disertai aturan-aturan perdagangan yang berbeda-beda.¹² Dalam konteks modern perdagangan internasional terjadi karena masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya merasa memperoleh manfaat dari adanya perdagangan tersebut, dengan demikian perdagangan tidak lain adalah kelanjutan atau bentuk yang lebih maju dari

¹⁰ Tulus. TH. Tambunan, *Transformasi Ekonomi Di Indonesia: Teori Dan Penemuan Empiris*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001).

¹¹ Walter S Jones, *Logika HI 2 Kekuasaan Ekonomi Politik Internasional Dan Tatahan Dunia*, (Gramedia Pustaka Utama) hal, 249

¹² Muzamil Zamahsari *Pemasaran Internasional* (Jakarta: Intermedia 1992). hal 29

pertukaran yang didasarkan atas kesukarelaan masing-masing pihak yang terlibat. Akan tetapi dengan melihat persaingan yang ada dan kebutuhan pasar semakin meningkat timbul pertanyaan bagaimana upaya suatu negara untuk meningkatkan kegiatan perdagangannya dengan Negara lain?

Bagi Tunisia politik luar negeri berpegang pada prinsip politik non-blok, menolak ekstrimisme agama dan terorisme, bersikap moderat dan pragmatis, tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara lain, serta menghormati hak-hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia-Tunisia bersepakat saling mengembangkan dalam berbagai bidang terutama bidang ekonomi. Hal ini di realisasikan dengan adanya penandatanganan berbagai perjanjian atau MOU. Indonesia merupakan mitra dagang terpenting Tunisia di Asia Tenggara perjanjian perdagangan Indonesia-Tunisia sudah sangat berlangsung lama, yaitu pada tanggal 28-11-1983 perjanjian tersebut akan sangat membantu Indonesia untuk mengembangkan prekonomian ke Tunisia, memberikan keuntungan devisa negara dan tujuan untuk mendapatkan kepentingan nasional dan juga Tunisia. Oleh karena itu dapat dimengerti bahawa kepentingan nasional bersumber dari seluruh nilai yang di generalisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu Negara terhadap Negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan faktor penting bagi setiap Negara dalam melaksanakan politik luar negeri suatu negara, dimana ia tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategi untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri suatu Negara.

Kedua pemerintahan masing-masing Negara juga sangat berhubungan erat, itu bisa dilihat dari perhatian pemerintahan Tunisia pada musibah-musibah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik itu tsunami, gempa, dan lain-lain. setiap Negara mempunyai suatu untuk kepentingan nasionalnya demikian juga Indonesia demi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional pemerintah berupaya meningkatkan kegiatan ekspor dan menjalin kegiatan kreatifitas dengan Tunisia.

Strategi perdagangan nasional merupakan suatu kebijakan atau keputusan pemerintah dibidang ekonomi perdagangan internasional yang mengadung unsur “tepat guna”.

2. Teori Bilateral Trade

Menurut Jack C. Plano and Roy Olton *Bilateral Trade* adalah:

Kesepakatan dua Negara untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan kegiatan ekonomi persetujuan ekonomi belateral dapat berbentuk “*clearing arrangement*” sehingga pembayaran untuk barang ekspor dan impor dilakukan melalui sebuah rekening bank, atau dalam bentuk kesepakatan pembayaran yang mencakup seluruh transaksi keuangan kedua Negara. Dalam bentuk yang paling sederhana, perjanjian bilateral mencakup kesepakatan barter dan dengan kesepakatan tersebut pertukaran barang dari kedua Negara dalam jumlah tertentu dilakukan tanpa mempergunakan valuta asing.¹³

¹³ Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Holt, Rinehart & Winston

Bilateralisme ekonomi yang paling umum dipakai adalah dalam bentuk perjanjian perdagangan dengan saling mengurangi bea tarif masuk dan rintangan dan rintangan perdagangan lainnya. Kesepakatan antar pemerintah untuk bertukar barang. Berdasarkan persetujuan barter, jumlah barang ditukar sesuai dengan tingkat yang disepakati tanpa transaksi keuangan. Kesepakatan barter terjadi karena untuk mengatasi masalah devisa yang mengganggu perdagangan luar negeri. Perjanjian bilateral memainkan peran penting dalam memajukan perdagangan antar bangsa pada masa mengatasi kebijaksanaan "restruktif" nasional yang mencakup pengawasan devisa, tarif, dan kuota selain dipergunakan untuk mengendalikan perdagangan kearah pencapaian tujuan politik.

Perjanjian bilateral cenderung menjadi kesepakatan istimewa dan dengan sangat alamiah besikap diskriminasi terhadap bangsa lain, sehingga kerap mengundang pembalasan serupa. Pencantuman *most favored Nation* dalam perjanjian bilateral seperti yang dicantumkan di dalam program perjanjian perdagangan timbal balik serta dalam kerangka *General Agreement on Tarif and Trade* (GATT) dapat menghilangkan dampak diskriminasi. Melalui cara seperti ini mereka berperan serta untuk menumbuhkan sistem perdagangan multilateral yang lebih bebas dari pada mendorong terjadinya diskriminasi perdagangan. Negara komunis mempergunakan perjanjian bilateral dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Negara berkembang. Mereka memberikan kredit jangka panjang dalam bantuan teknik, barang modal, dan perlengkapan militer yang harus dibayar oleh Negara penerima bantuan dengan mengirimkan barang komoditi selama jangka waktu yang disepakati.

Dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral RI-Tunisia, pemerintahan Indonesia melakukan Kunjungan pada tahun 2010 ke Tunisia bertujuan untuk mempelajari sistem pembiayaan ekspor guna membantu pengusaha Indonesia dan memperlancar ekspor ke pasar Tunisia sebagai tujuan pasar non-tradisional oleh Indonesia. Pertemuan tersebut merupakan langkah antisipasi untuk meningkatkan volume perdagangan RI-Tunisia jika kedua negara menandatangani *Preferential Trade Arrangement (PTA)*. Upaya untuk pembentukan PTA antara kedua negara telah dimulai dengan melakukan *Joint Study Group (JSG)* di bidang ekonomi dan perdagangan.

Pada pertemuan JSG ke-2 diadakan pada tanggal 16-17 Juni 2010 di Bali, adalah pembahasan kebijakan perdagangan, hambatan perdagangan dan investasi, produk potensial yang akan diperdagangkan kedua negara, penurunan tarif bea masuk, dan kerjasama lainnya seperti, investasi, promosi perdagangan, *customs, special economic zone*, perikanan, industri dan *handicraft*. Semangat kerjasama bilateral diharapkan dapat memperkecil perbedaan pandangan tersebut, sehingga solusi yang menguntungkan kedua pihak dapat ditemukan. Tunisia telah menyampaikan draft PTA kepada Indonesia untuk dinegosiasikan kedua belah pihak. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ke-2 JSG yang penting bagi Indonesia dan diharapkan dapat membangun kerjasama bilateral yang lebih baik dengan Tunisia antara lain adalah komitmen untuk menghapus hambatan perdagangan dan investasi, penurunan tarif bea masuk di Tunisia dan PTA. Dan pada kesempatan itu pemerintahan Indonesia juga telah menyampaikan *indicative list of potential products* untuk pasar Tunisia

D. Hipotesa

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas dan didukung konsep yang dianggap membantu analisa, maka penulis mengajukan hipotesa sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia meningkatkan perdagangan langsung dengan Tunisia.
2. Meningkatkan anggaran dan promosi UKM-UKM di Tunisia.
3. Mengadakan *joint study group* di bidang ekonomi dan perdagangan sebagai kesepakatan awal untuk membentuk landasan negosiasi PTA karena dengan adanya PTA, produk Indonesia akan lebih dapat bersaing di Tunisia, sehingga akan lebih banyak lagi produk Indonesia yang masuk ke Tunisia.

E. Tujuan Penulisan

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian ilmiah yang senantiasa memiliki tujuan penulisan, maka tujuan penulisan ini adalah:

Pertama, penulisan ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori-teori yang pernah penulis peroleh selama duduk dibangku kuliah, serta menambah pemahaman keilmuan secara lebih mendalam.

Kedua, penulisan ini agar dapat memberikan gambaran objektif mengenai upaya-upaya serta peluang Indonesia-Tunisia dalam mempererat hubungan bilateral dalam bidang perdagangan.

Ketiga, menambah wawasan penulis khususnya tentang perekonomian Indonesia dan Indonesia di mata internasional.

Keempat, tujuan yang juga tidak bisa dipungkiri, secara jujur penulis akui bahwa penulisan ini dimaksudkan sebagai salah satu sebagai svarat untuk menvelesaikan studi

kesarjanaan (Strata 1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Jangkauan Penelitian

Tanpa pembatasan masalah dalam suatu penulisan ilmiah dapat menggelincirkan pokok bahasan menjadi meluas. Oleh sebab itu diperlukan batasan dengan mengadakan jangkauan penulisan.

Berdasarkan hal diatas, penulis perlu membatasi tulisan tentang peluang hubungan bilateral Indonesia-Tunisia setelah diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas Tunisia- Uni Eropa 2008 sampai 2010. Dikarenakan dipenghujung 2010 suasana politik dalam negeri Tunisia kian memanas, sehingga pada tanggal 15 Januari 2011 Presiden Ben Ali turun dari jabatannya. Hanya dalam bidang perdagangan yang membahas berbagai pelaksanaan hubungan perdagangan di antara kedua Negara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada data yang diambil dari bidang lainnya untuk mendukung penulisan.

G. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif. Artinya dengan berdasarkan kerangka teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang selanjutnya akan dibuktikan melalui empiris. Pengumpulan data ini akan dikumpulkan melalui studi pustaka, oleh karena itu data yang akan diolah merupakan data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, majalah-majalah, dokumen dan laporan-laporan resmi baik yang diterbitkan atau tidak, serta sumber-sumber lain yang dapat di jadikan acuan dan membantu bahan dalam karya tulis ini

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam pembahasan, penulis dan pemahaman terhadap pemikiran yang ingin penulis tuangkan dalam tulisan ini maka sangat perlu kami buat sistematika penulisan yang telah kami rencanakan sebagai berikut:

- Bab I pokok pembahasan pendahuluan dengan sub pokok bahasan diantaranya, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok pembahasan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.
- Bab II dalam bab ini penulis membahas mengenai kondisi hubungan serta perhatian Indonesia ke Afrika dan juga Tunisia dalam bidang politik, sosial budaya, dan gambaran umum mengenai terobosan yang dilakukan Indonesia-Tunisia yang berupaya untuk meningkatkan perekonomian masing-masing Negara, tawaran kerjasama Tunisia dengan Indonesia, perkembangan ekspor-impor Indonesia.
- Bab III Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang peluang yang dimiliki oleh Indonesia untuk bersaing di pasar Tunisia, dan menjadikan Tunisia sebagai *gateway* untuk memasuki pasar Uni Eropa dan Afrika. Kemudian menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Indonesia untuk mendapatkan peluang atas hubungan Tunisia dan Uni Eropa ini, dan juga memaparkan hasil dari perdagangan Indonesia dan Tunisia 2008.